

**TESIS**

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI MELALUI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA**

**THE EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING ON ECONOMIC GROWTH  
THROUGH THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN INDONESIA**

**MUHAMMAD YUSUF Y.S**

**A032172003**



**PROGRAM MAGISTER  
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**TESIS**

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI MELALUI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD YUSUF Y.S**

**A032172003**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER  
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

TESIS

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD YUSUF.Y.S**  
**A032172003**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis  
pada tanggal **06 AGUSTUS 2021**  
dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Komisi penasihat

Ketua

Anggota



**Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, SE., MA**  
NIP: 19590306 1985503 1 002



**Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM®**  
NIP: 19770119 200801 2 008

Ketua Program Studi  
Magister Ekonomi Pembangunan  
dan Perencanaan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA., CWM®**  
NIP. 19651012 199903 2 001



**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si**  
NIP. 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf.Y.S

Nim : A032172004

Program Studi : Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:  
**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI MELALUI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/terbitkan sebelumnya, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).



Muhammad Yusuf.Y.S

## **KATA PENGANTAR**

Segala puja dan puji hanya untuk Allah SWT, dzat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang tak henti-hentinya memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh ummat manusia. Berkat izin-Nya pulalah penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sang pejuang kemanusiaan, pembela kaum tertindas, yang telah menjadi suri teladan umat menuju gerbang pencerahan, semoga kelak penulis mampu mengikuti jejak perjuangan Beliau. Aamiin.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari fakta yang menunjukkan bahwa ditengah pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat tidak berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami fluktuasi selama sepuluh tahun terakhir. Sehingga peneliti tertarik untuk menyumbang konsep untuk menyikapi permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan fiskal, dimana pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur sebagai variabel dependennya.

Tesis ini merupakan sebuah karya penulis yang masih jauh dari sempurna, sebuah tulisan yang bahkan oleh penulis sendiripun tak akan menyangkal untuk mengakuinya sebagai sebuah karya yang belum layak baca. Akan tetapi sebagai sebuah proses awal, penulis berharap tulisan ini mampu memberikan banyak pelajaran dan mampu menjadi pemantik semangat dalam melahirkan karya-karya selanjutnya. Karya yang mendidik, karya yang jujur, dan tentu saja karya yang telah layak baca. Harapan itu tidak hanya untuk penulis sendiri tapi untuk para pembaca sekalian, baik yang sengaja maupun yang secara tak sengaja membaca

Tesis ini Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan tesis ini, dan hanya berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihaklah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, SE., MA. sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si sebagai Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingannya yang diberikan selama menyelesaikan tesis ini.

Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program S2, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi Unhas, Prof Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unhas. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program S2 Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin dan kepada seluruh tim penguji, Prof. Dr. Nursini, SE., MA, Drs. Muhammad Yusri Zamhuri., MA, Ph.D, Dr. Ir. Muhammad Jibril Tajibu, SE.,M.Si, dan Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE.,MA.,CWM® selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan yang telah meluangkan waktu dalam meneliti keabsahan dan memberikan kritik serta saran yang sangat berguna atas penyempurnaan tesis ini. Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh staf akademik Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan urusan-urusan akademik.

Terima kasih teman-teman EPP dan ESD Unhas yang telah banyak membantu penulis, teman-teman S1 Ilmu Ekonomi yang masih keep in touch yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan moril serta kerja samanya. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada

teman semasa kuliah di Pasca Sarjana Unhas yaitu Riska Hawang, Irawati, Samsuardi Nelson dan Ariyanto Hidayat yang senantiasa membantu dan menemani penulis. serta semangat dan doa yang tiada henti serta teman-teman dan para sahabat di Pasca Ekonomi dan Bisnis UNHAS EPP, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan kedua orang tua, Ayahanda Yuhana Joni Talli dan Ibunda Suhaning dalam mendidik, membesarkan dan mendoakan penulis. Penulis juga sangat bersyukur dan merasa beruntung karena tidak hanya sebagai orang tua, keduanya juga sangat berperan dalam memberikan petunjuk, doa, saran, motivasi dan telah menitiskan niat dan ruh suci dan keikhlasan dalam menuntut ilmu sehingga penulis dapat mencapai cita-cita dan kepada kedua saudara penulis, Suarni dan Jumriani yang dengan penuh kesabaran terus membimbing dan memberi saran kepada penulis. Kepada Abdullah dan Saparuddin, terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga kami. Maha Suci Engkau Ya Allah tidaklah ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau telah beritahukan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala hikmah. Wallahu'alam.

Makassar, Agustus 2021

Muhammad Yusuf.Y.S

## ABSTRAK

**MUHAMMAD YUSUF.Y.S.** Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. (Dibimbing oleh Abd. Hamid Paddu dan Nur Dwiana Sari Saudi).

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indkes pembangunan manusia pada seluruh provinsi di Indonesia, adapun periode penelitian sejak tahun 2016 sampai 2019.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa data panel. Data panel adalah gabungan antara data *cross section* dan data *time series*, yang terdiri dari data seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2019. Adapun sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan dan sumber lainnya.

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan pengeluaran pendidikan secara langsung berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Pengeluaran kesehatan secara langsung tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Pengeluaran infrastruktur secara langsung berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pendidikan secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung berpengaruh melalui indeks pembangunan manusia. Pengeluaran kesehatan secara langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia. Pengeluaran infrastruktur secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia.

**Kata Kunci:** *Pengeluaran Pemerintah, Indeks pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi.*



## ABSTRACT

**MUHAMMAD YUSUF.Y.S** The Effect of Government Spending on Economic Growth Through the Human Development Index in Indonesia. (Supervised by Abd. Hamid Paddu and Nur Dwiana Sari Saudi).

This study aims to examine the effect of government spending on the education sector, health sector, infrastructure sector on economic growth through the human development index in all provinces in Indonesia, while the research period is from 2016 to 2019.

This research uses secondary data, in the form of panel data. Panel data is a combination of cross section data and time series data, which consists of data from all provinces in Indonesia from 2016 to 2019. The data sources are obtained from the Central Statistics Agency, the Directorate General of Fiscal Balance, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Ministry of Public Works and Housing, People, Ministry of Health and other sources.

The findings of this study indicate that education expenditure directly affects the human development index. Health spending has no direct effect on the human development index. Infrastructure spending directly affects the human development index. The human development index directly affects economic growth. Education expenditure directly affects economic growth and indirectly affects through the human development index. Health spending has no direct effect on economic growth and indirectly through the human development index. Infrastructure spending directly affects economic growth and indirectly through the human development index.

**Keywords:** *Government Expenditure, Human Development Index and Economic Growth.*



## DAFTAR ISI

<b>Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Pernyataan Keaslian Tesis .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	11
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	13
2.1.3. Teori Pengeluaran Pemerintah .....	16
2.2 Hubungan Antar Variabel .....	23
2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	23
2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	27
2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	32
2.2.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	34
2.2.5 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Lesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	36

2.2.6 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	37
2.2.7 Hubungan Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	40
2.3 Tinjauan Empiris .....	41
<b>BAB III Kerangka Konseptual Dan Hipotesis.....</b>	<b>49</b>
3.1 Kerangka Konseptual .....	49
3.2 Hipotesis .....	51
<b>BAB IV Metode Penelitian .....</b>	<b>52</b>
4.1 Rancangan Penelitian .....	52
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	52
4.3 Populasi .....	53
4.4 Jenis dan Sumber Data .....	53
4.5 Metode Pengumpulan Data.....	54
4.6 Metode Analisis .....	54
4.7 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional .....	57
<b>BAB V Hasil dan Pembahasan .....</b>	<b>58</b>
5.1 Deskripsi Data .....	58
5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019 .....	58
5.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019.....	60
5.1.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019.....	63
5.1.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019.....	66
5.1.5 Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019.....	69
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	72
5.3 Pembahasan.....	75
5.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	74
5.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	75

5.3.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	77
5.3.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	79
5.3.5 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	80
5.3.6 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	82
5.3.7 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	84
5.3.8 Pengaruh Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia .....	87
8.3.9 Pengaruh Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia .....	88
5.3.10 Pengaruh Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia .....	90
<b>BAB VI Kesimpulan dan Saran.....</b>	<b>93</b>
6.1 Kesimpulan .....	93
6.2 Saran .....	94
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>95</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi (%) di Indonesia tahun 2010 2019.....	3
Tabel 2.1 Peta Studi Terkait Sebelumnya .....	41
Tabel 5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi ( <i>Persen</i> ) di Indonesia .....	59
Tabel 5.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi ( <i>Persen</i> ) di Indonesia .....	62
Tabel 5.1.3 Pengeluaran Pendidikan Provinsi ( <i>Triliun Rupiah</i> ) di Indonesia .....	65
Tabel 5.1.4 Pengeluaran Kesehatan Provinsi ( <i>Triliun Rupiah</i> ) di Indonesia .....	68
Tabel 5.1.5 Pengeluaran Infrastruktur Provinsi ( <i>Triliun Rupiah</i> ) di Indonesia .....	70
Tabel 5.2.1 Hasil Analisis Regresi Hubungan Langsung.....	72
Tabel 5.2.2 Hasil Analisis Regresi Hubungan Tidak Langsung.....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	51
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Mentah Penelitian .....	102
Lampiran 2 : Data Dalam Ln.....	106
Lampiran 3 : Hasil Regression.....	110

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi yang ada (Todaro & Smith, 2011).

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan faktor-faktor produksi yang merangsang perkembangan ekonomi suatu Negara/daerah dalam skala besar yang dapat diukur dari perkembangan pendapatan riil yang dicapai negara/daerah.

Suatu negara dapat dikatakan memiliki kondisi perekonomian yang baik melalui perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau secara sederhana diukur dari peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dikenal dengan terminology Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan PDB berdasarkan harga konstan (PDB Riil) untuk mengeliminasi pengaruh perubahan harga selama periode waktu pengukuran. (Mankiw, 2006).

Instrumen penggerak utama dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan pembangunan manusia (Ranis et.al, 2000). Karakteristik

pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan PDRB per kapita, PDRB per kapita yang tinggi akan mengubah pola konsumsi dalam memenuhi kebutuhan (Todaro 1998). Ini berarti bahwa semakin tinggi daya beli masyarakat, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Ini akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di mana salah satu indikatornya adalah paritas daya beli. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan kecuali jika didahului atau disertai dengan peningkatan pembangunan manusia, (Andriyani, 2019).

Pembangunan manusia merupakan komponen utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, UNDP (*United Nations Development Programme*) membentuk indikator bernama *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak pengukuran IPM diberlakukan, orientasi pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kepada manusia sebagai elemen dasar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Badrudin, 2011).

Pembangunan manusia merupakan upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan, derajat kesehatan dan daya beli. (Laisina, 2015).

**Tabel 1.1: Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi (%) di Indonesia tahun 2010 – 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>
<b>2010</b>	66.53	6.22
<b>2011</b>	67.09	6.17
<b>2012</b>	67.7	6.03
<b>2013</b>	68.31	5.56
<b>2014</b>	68.9	5.01
<b>2015</b>	69.55	4.88
<b>2016</b>	70.18	5.03
<b>2017</b>	70.81	5.07
<b>2018</b>	71.39	5.17
<b>2019</b>	71.92	5.02

Sumber: BPS, 2020

Terlihat pada **Tabel 1.1** Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2010, bahkan pada tahun 2015 turun sampai angka 4.88 % sebelum Kembali meningkat pada tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami fкультuasi hal ini memberikan indikasi bahwa perencanaan yang masih lemah perlu mendorong kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, angka indeks pembangunan manusia selama 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

Tinggi rendahnya nilai IPM yang dicapai oleh setiap negara atau daerah tentu tidak terlepas dari peran pemerintah, khususnya dalam kebijakan fiskal yang berkaitan dengan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh Wolfson dalam Suparmoko bahwa, kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan tindakan - tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya dan penentuan harga barang dan jasa (Lilik, 2008).

Klasifikasi pengeluaran Pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsi terdiri dari Sembilan fungsi yaitu pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di dalam pasal 33). Di antara fungsi tersebut, tanpa mengesampingkan fungsi yang lain, terdapat empat fungsi yang perlu diteliti terlebih melihat pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia yaitu fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi perumahan dan fungsi fasilitas umum.

Pengeluaran pemerintah yang ditujukan pada fungsi tertentu dapat menciptakan *multiplier effect* ekonomi melalui agregat permintaan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah, salah satunya melalui alokasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsi yang tepat. Terdapat hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan, pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti misalnya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan, namun pada tahap ini peran swasta juga semakin diperlukan pada tahap menengah pengeluaran pemerintah dan swasta sedikit beralih pada sektor-sektor lain misalnya industri, namun pengeluaran pemerintah dan swasta ini tidak menyampingkan kepentingan publik seperti kesehatan dan pelayanan sosial. Pada tingkat pembangunan ekonomi lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti

halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Rostow dan Musgrave dalam Guritno (1993).

Kaitan antara pengeluaran untuk sektor publik terhadap pembangunan manusia sebenarnya mudah untuk ditelusuri. Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam penentuan pembangunan manusia. Anggaran dalam bidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan angka harapan lama sekolah (Akbar, 2016). Anggaran dalam bidang perumahan dan fasilitas umum dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Efektifitas kebijakan fiskal daerah pada pengeluaran pemerintah 3 faktor, pengeluaran bidang kesehatan, pengeluaran bidang pendidikan, pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas umum membuat suatu negara atau daerah mengalami kemajuan, begitu juga dengan sumber daya manusianya yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Akbar, 2016).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, dijelaskan bahwa fokus belanja pemerintah diantara peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui anggaran pendidikan Rp.508,1 Triliun untuk peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia, perluasan akses pendidikan, peningkatan skill, *entrepreneurship*, ICT dan penelitian. Anggaran kesehatan Rp. 132,2 Triliun untuk percepatan pengurangan stunting, promotif preventif dan program jaminan kesehatan nasional. Dan anggaran infrastruktur Rp 423,3 Triliun untuk meningkatkan daya saing investasi dan ekspor, mendukung

transformasi industrialisasi dan mendorong skema pembiayaan kreatif. (UU Nomor 20 Tahun 2019).

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat fundamental bagi perkembangan sebuah negara. Banyak ahli mengemukakan bahwa bidang pendidikan menjadi faktor penentu kualitas sumberdaya manusia yang kemudian akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan di suatu negara (Kest, 2005).

Pendidikan juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan, hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari investasi jangka panjang, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. (Meier dan Rauch, Aloysius Gunadi Brata, 2002).

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di daerah- daerah ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Dalam era otonomi daerah dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengelola potensi-potensi yang memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. (Nur Vadila Putri, 2018).

Sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak pemerintah pusat atau daerah mesti memperhatikan sektor kesehatan dan pendidikan melalui alokasi pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan dan pendidikan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan produktivitas penduduk. Peningkatan produktivitas ini pada gilirannya akan mampu meningkatkan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi (Widodo, 2011).

Pengembangan sumber daya manusia memiliki kapasitas untuk memperbesar pilihan dan kesempatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup sehat melalui keterampilan yang diperoleh dan pengetahuan yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa melalui peningkatan produktivitas (Oluwatobi & Oluranti, 2011).

Selain pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan, pengeluaran pemerintah yang fokus pada pengeluaran publik adalah pengeluaran infrastruktur yaitu total pengeluaran layanan dasar, fungsi perumahan dan fasilitas umum. Hubungan pengeluaran infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, mengungkap hasil yang berbeda oleh para peneliti. Sebagian besar meyakini bahwa pengeluaran pemerintah dengan fokus pada pengeluaran publik memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, peningkatan pengeluaran publik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. (Jurais, 2020).

Pembangunan infrastruktur yang memadai dan makin berkualitas memang sangat diperlukan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi secara optimal, dan dapat menjamin tercapainya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata. (Windhu Putra, 2017). Pengeluaran publik yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti contohnya pembangunan rumah sakit dan gedung sekolah membuat masyarakat langsung dapat menikmati fasilitas tersebut karena program-program kesehatan dan pendidikan gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan jalan dan jembatan memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas tersebut dengan semakin baiknya infrastruktur maka akan meningkatkan langsung Indeks Pembangunan Manusia. (Nur Vadila Putri, 2018).

Berdasarkan beberapa argumen di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai keterkaitan antara pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi infrastruktur dimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 ketiga fungsi tersebut dikategorikan sebagai fokus belanja pemerintah pusat, serta pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia sebagai variabel dependen, dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia di Indonesia?
2. Apakah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia di Indonesia?
3. Apakah pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia di Indonesia?
4. Apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?
5. Apakah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?

6. Apakah pengeluaran pemerintah fungsi infrastruktur berpengaruh secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?
7. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui indeks pembangunan manusia di Indonesia.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

6. Untuk menganalisis dan mengetahui berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui berapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi atau masukan terhadap perbedaan kinerja pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini juga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan ekonomi terutama tentang pola pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Suatu Negara dapat dikatakan memiliki kondisi perekonomian yang baik melalui perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau secara sederhana diukur dari peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dikenal dengan terminology Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan PDB berdasarkan harga konstan (PDB Rill) untuk mengeliminasi pengaruh perubahan harga selama periode waktu pengukuran. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan rata-rata dari output yang dihasilkan tiap orang dalam produksi barang dan jasa yang merupakan tingkat pertumbuhan perkapita secara rill bagi setiap orang (Shone R, 1989)

PDB diartikan sebagai nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang di produksi oleh suatu negara dalam periode tertentu (Mankiw, 2006). Pertumbuhan ekonomi sebagai proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam keadaan masyarakat suatu perekomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat ekonomi yang dicapai tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya (Kusumo, 2007).

Adam Smith mengemukakan bahwa faktor manusia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan spesialisasi dalam meningkatkan produktivitas. Smith dan Richardo percaya bahwa batas dari pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan tanah. Kaum klasik juga yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai akibat adanya pembentukan akumulasi modal yang bersumber dari adanya surplus dalam ekonomi. Namun demikian

David Ricardo pesimis bahwa tersedianya modal dalam jangka panjang akan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi (Syam, 2014).

Teori pertumbuhan neo-klasik pertama kali dikembangkan oleh Robert Sollow. Teori neo-klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Dalam analisis neo-klasik diyakini bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu dan perkembangannya dari satu waktu ke waktu (Lestari, 2013).

Teori neo-klasik dipandang sebagai teori yang lebih tepat dan lebih sempurna dalam menerangkan fenomena pertumbuhan ekonomi jangka panjang kalau dibandingkan dengan teori klasik. Sebabnya adalah karena teori ini melihat bagaimana setiap faktor produksi dan perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori ini bukan saja memperhatikan peranan tenaga kerja dalam pertumbuhan, tetapi yang lebih penting, teori ini dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan empiris mengenai peranan relatif dan modal, teknologi dan tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi (Lestari, 2013).

Teori pertumbuhan ekonomi Keynes, berdasarkan pada hipotesis siklus arus uang yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan. Pada teori ini konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan orang lain pada perekonomian yang sama. Pergerakan aktifitas perekonomian ditentukan oleh tiga hal dalam perekonomian makro yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu; produksi, permintaan, dan pendapatan. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga jenis pendekatan

diantaranya pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan pendekatan produksi (Alfianita, 2017).

Pendekatan yang sering digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional adalah dengan pendekatan pengeluaran dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran (belanja) pelaku ekonomi dalam suatu negara selama periode tertentu (Alfianita, 2017).

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu Negara, seperti peningkatan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, peningkatan jumlah sekolah, peningkatan produksi sektor jasa, dan peningkatan produksi barang modal. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu Negara yang diukur melalui presentase pertambahan pendapatan rill. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan dimana terjadinya pertambahan atau perubahan pendapatan nasional dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya (Todaro, 2004).

### **2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pembangunan manusia pada hakikatnya adalah memperluas pilihan bagi masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan tiap-tiap anggota masyarakat sehingga pembangunan manusia dalam hal ini juga mencakup berbagai aspek lainnya yaitu selain aspek ekonomi terdapat pula aspek sosial, politik, budaya serta aspek lainnya untuk menjadikan manusia lebih produktif dalam berkegiatan. Dengan demikian paradigma pembangunan manusia mencakup dua sisi yaitu berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan

taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik (Sunartomo, W. 2014).

Pembangunan manusia juga merupakan upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan (Laisina, 2015).

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup.

Aspek pembangunan manusia ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan *Gross Domestic Bruto*. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran

dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak (Sunartomo, W. 2014).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 adalah sebuah rata-rata sederhana dalam tiga dimensi yang mengukur pencapaian di suatu negara terkait “Hidup yang panjang dan sehat”, yang diukur dengan harapan hidup saat lahir, “Pengetahuan”, sebagaimana diukur dengan tingkat melek huruf orang dewasa dan dikombinasikan dengan rata-rata lama sekolah dan “Standar kehidupan yang layak”, yang diukur dengan taksiran penghasilan yang diperoleh di Paritas Daya Beli (PPP). (Mittal, 2016).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia (Kahang, 2016).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengaplikasikan penghitungan IPM tersebut untuk melihat kemajuan pembangunan manusia di Indonesia baik pada level provinsi maupun level kabupaten/kota. BPS melakukan beberapa penyesuaian pada penghitungan IPM, yaitu pada komponen pendidikan dan ekonomi. Pada komponen pendidikan, BPS menggunakan MYS bukan Angka Partisipasi Sekolah (APS) karena APS merupakan indikator input, sementara MYS merupakan indikator output yang lebih mampu menggambarkan pencapaian di bidang pendidikan. Kemudian pada komponen ekonomi, BPS menggunakan PPP dengan pendekatan pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan karena lebih mampu

menggambarkan daya beli masyarakat dibandingkan dengan Gross Domestic Product (GDP) (Kahang, 2016).

Pembangunan manusia adalah sebuah proses perluasan pilihan bagi manusia, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat dipersentasikan oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan dipersentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah, sementara dimensi kehidupan yang layak dipersentasikan oleh indikator kemampuan daya beli (Badan Pusat Statistik, 2012).

### **2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa  $Y = C + I + G + X - M$ . Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

Pengeluaran pemerintah menurut Mangkoesoebroto merupakan cerminan kebijakan pemerintah lakukan, yaitu jika pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan

biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut (Sudartomo, 2014).

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan PDRB terus menghasilkan serangkaian perdebatan di kalangan ahli ekonomi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah pada infrastruktur sosial, ekonomi dan fisik mendorong PDRB. Sebagai contoh pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan output nasional. Demikian pula, pengeluaran untuk infrastruktur seperti jalan, komunikasi, listrik, dll, mengurangi biaya produksi, meningkatkan investasi sektor swasta dan profitabilitas perusahaan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Monday et al., 2014).

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (*enlarging the choices of the people*). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Di tengah eskalasi persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi. Jika tidak demikian maka bangsa tersebut akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju (BPS, 2008).

Menurut Lyakurwa (2007), pengembangan sumber daya manusia memiliki kapasitas untuk memperbesar pilihan dan kesempatan masyarakat, meningkatkan

taraf hidup sehat melalui keterampilan yang diperoleh dan pengetahuan yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto bangsa melalui peningkatan produktivitas (Oluwatobi & Oluranti, 2011).

Kebijakan pemerintah untuk belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas manusia dalam bentuk pelayanan masyarakat. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kuncoro, 2013).

Menurut PP 71 Tahun 2010, belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis, organisasi dan fungsi. Klasifikasi belanja fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Selain itu tujuan klasifikasi belanja fungsi adalah sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja serta untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumberdaya yang terbatas.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diperbaharui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Klasifikasi Belanja Pemerintah menurut fungsinya dibagi menjadi sembilan fungsi yaitu fungsi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

Kesembilan fungsi tersebut dikelompokkan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan Buku Pokok-pokok Siklus APBN di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan, siklus APBN diawali dengan tahapan kegiatan perencanaan dan penganggaran APBN. Terkait penyusunan rencana anggaran (kapasitas fiskal), Pemerintah, BPS, Bank Indonesia mempersiapkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh Pemerintah. Selain itu juga disiapkan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Dalam tahapan ini, terdapat dua kegiatan penting yaitu: perencanaan kegiatan (Perencanaan) dan perencanaan anggaran (Penganggaran). (KEMENTERIAN PUPR, 2017).

a. Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan

Baldacci et al. menyatakan “But a greater share of investment in human capital should be channeled toward primary education” (bagian yang lebih besar dari investasi dalam modal manusia harus disalurkan menuju pendidikan). Masalah yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah adalah distribusi pendidikan yang tidak merata. Di sisi lain hubungan investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan pembangunan ekonomi merupakan dua mata rantai yang saling berkaitan (Sunarni, 2017).

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Hal ini diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31. Dalam pasal tersebut juga dibahas tentang kewajiban negara dalam menjamin ketersediaan bagi setiap warga negaranya (BPS, 2018). Pada saat ini, pemerintah menganggarkan pendidikan minimal 20% dari APBN. Hal ini tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 49

ayat 1 yang menyebutkan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Belanja kesehatan dapat meningkatkan pembangunan manusia melalui dua saluran: 1) pertumbuhan ekonomi, dan 2) mengurangi tingkat kematian serta meningkatkan proses pembelajaran (Aviyati dan Susilo, 2016 (Sunarni, 2017). Kesehatan menjadi faktor yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan tidak akan dapat di capai apabila terdapat prevalensi penyakit yang tinggi di dalam sebuah negara (ILO, 2017). Untuk mengatasi prevalensi penyakit, maka negara perlu memperkuat sistem kesehatan. Negara sulit memiliki sistem kesehatan terbaik karena adanya keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur kesehatan, dan keterbatasan sumber daya manusia di sektor kesehatan (Lakshminarayanan, 2011). Pemerintah perlu meningkatkan tingkat belanja sektor kesehatan sehingga banyak masalah kesehatan bisa diatasi. Hal ini disebabkan karena pada umumnya, masyarakat dengan tingkat kesehatan yang baik dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak di bandingkan masyarakat dengan tingkat kesehatan buruk, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat (Wang, 2015). Sumber

pembiayaan untuk kesehatan dibedakan menjadi dua yaitu, sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta.

Sumber pembiayaan dari pemerintah meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan bantuan luar negeri. Sedangkan dari swasta meliputi perusahaan swasta/BUMN yang digunakan membiayai karyawannya, badan penyelenggara asuransi kesehatan, dan lembaga non pemerintah berkegiatan kesehatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan (Wasisto & Ascobat, 1986).

Sesuai dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 170 ayat 1 pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil yang berguna untuk terjaminnya pembangunan kesehatan agar meningkatnya derajat kesehatan yang tinggi. Dan anggaran kesehatan pada pasal 171 ayat 1, besaran anggaran kesehatan pemerintah 5% dari APBN di luar gaji. Untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji.

#### c. Pengeluaran Pemerintah Fungsi Infrastruktur

Pengertian infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur fisik dan jasa layanan yang diperoleh darinya untuk memperbaiki produktivitas ekonomi dan kualitas hidup seperti transportasi, telekomunikasi, kelistrikan, dan irigasi. Sedangkan infrastruktur permukiman adalah infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur fisik dan layanan yang diperoleh darinya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas hidup seperti air bersih dan perumahan. Peran infrastruktur dalam pembangunan dapat dilihat dari sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup. Sesuai dengan pasal 1 angka 65 PMK Nomor

112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dimaksud Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Belanja Infrastruktur yang dimaksud merupakan belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, Sedang dalam tingkat ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Kontribusi infrastruktur terhadap peningkatan kualitas hidup dapat ditunjukkan oleh terciptanya *amenities* dalam lingkungan fisik, terjadinya peningkatan kesejahteraan, (peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata), terwujudnya stabilisasi makro ekonomi (keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja). (BAPPENAS,2002).

Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur telah meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pengeluaran sektor publik telah meluas yang telah menimbulkan minat baik di negara maju maupun berkembang mengoptimalkan ukuran pengeluaran pemerintahan. Aphu (2019).

Penyediaan fasilitas infrastruktur memiliki tujuan ganda untuk menghasilkan peningkatan pendapatan secara langsung sementara pada saat yang sama menggunakan fasilitasnya mendorong sektor-sektor produktif guna menghasilkan dan menyediakan lapangan kerja bagi populasi atau angkatan kerja (Araga, 2016).

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP Tahun 2020 utamanya akan fokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional, diantaranya: Pembangunan Manusia dengan sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia dan Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah dengan sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah, meningkatkan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi dan terpenuhinya perumahan dan pemukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga. Adapun besaran anggaran untuk tahun 2020 yakni Rp. 280 Triliun. (UU No. 20 tahun 2019).

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan pembangunan sektor lainnya. Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas telah

menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan. Negara dengan tingkat ketimpangan pendidikan tinggi secara konsisten menunjukkan tingkat inovasi yang lebih rendah, rendahnya tingkat efisiensi produksi, dan kecenderungan untuk mentransmisi kemiskinan lintas generasi (Winarti, 2014).

Todaro juga menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, sehingga merupakan hal fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Mulyadi menyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia dapat dipenuhi dengan berbagai kebijakan, yaitu pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang, pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan, untuk penduduk miskin peningkatan kualitasnya dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif serta mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepaskan diri dari kemiskinan menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan KB, meningkatkan keseimbangan kepadatan dan penyebaran penduduk (Dewi Novita, 2017).

Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke

tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Winarti, 2014).

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu Negara, dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. (Adi Widodo dkk., 2011). Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan (Lanjouw,2001).

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Menurut Lanjouw, dkk, Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental. Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk

terjadi. Seperti diungkapkan oleh Meier dan Rauch dikatakan pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. (Laisina, 2015).

Menurut Fitzsimons, teori *human capital* adalah teori ekonomi paling berpengaruh dari pendidikan barat, menetapkan kerangka kerja untuk kebijakan pemerintah sejak awal 1960-an. Pendidikan dan pelatihan adalah instrumen penting dalam pengembangan persediaan sumber daya manusia dari negara mana pun. Dari sudut pandang Ekonom Pembangunan, modal manusia terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan kemampuan manusia lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas. Lawanson (2009) menunjukkan bahwa kesehatan dan pendidikan secara kolektif meningkatkan produktivitas anggota individu masyarakat. Menurut Schultz (1961) sebagaimana dikutip oleh Ijaiya dan Ijaiya (2004) ada lima cara modal manusia dapat dikembangkan melalui perawatan dan fasilitas kesehatan, pada pelatihan kerja, secara formal menyelenggarakan pendidikan di tingkat dasar, menengah dan tinggi, dan program studi untuk orang dewasa. Kelima, menjadi migrasi individu dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kesempatan kerja. Dalam menggarisbawahi peran penting pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Jhinger, (2005) berpendapat bahwa dalam arti sempit, pengeluaran untuk pengembangan sumber daya manusia adalah investasi dalam pendidikan, tetapi dalam arti luas termasuk pengeluaran untuk kesehatan dan layanan sosial di umum. (Omankhanlen, 2014).

Setiap peningkatan pengeluaran pendidikan maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (Nur Vadila Putri, 2018). Dalam penelitian yang lain, menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan

demikian semakin besar pengeluaran pemerintah bidang pendidikan semakin tinggi kecepatan perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM). (Mailassa'adah, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (Tjodi, 2018).

### **2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Pake, 2018).

Todaro & Smith (2003), bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Menurut Lains dan Pasay yang lebih menekankan aspek pendidikan dalam pembangunan manusia, Tjiptoherijanto (1989) melihat mutu manusia dari sisi lain yaitu dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumberdaya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah (Astri, 2013).

Purcal dan Cohen menyatakan bahwa, betapa paradigma kesehatan di Indonesia memang jauh tertinggal dibanding negara-negara anggota ASEAN lainnya. Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, bahkan Vietnam sejak beberapa tahun lalu mulai melihat dan menempatkan masalah kesehatan sebagai investasi jangka panjang (*long term human investment*), sementara Indonesia konsumsi itu antara lain berupa pengabaian masalah kesehatan dalam prioritas anggaran pembangunan masih saja sulit beranjak dari paradigma lama, kesehatan sekadar sebagai konsumsi. Konsekuensi dari paradigma usang kesehatan sebagai konsumsi itu antara lain berupa pengabaian masalah kesehatan dalam prioritas anggaran pembangunan (Astri, 2013).

Pembangunan bidang kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya diharapkan bisa memberi manfaat positif bagi meningkatnya angka harapan hidup (Sharpe, 2007). Bidang kesehatan juga merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Kebutuhan seluruh lapisan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ini pada dasarnya merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Todaro & Smith, 2003, bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat (kahang, 2016).

Menurut Tjiptoherijanto (1989) bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut telah diteliti oleh Javar, Abbasian dan Sahar (2002) bahwa terdapat korelasi positif antara pengeluaran kesehatan pemerintah terhadap IPM. Temuan lainnya

menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah disektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan IPM (Astri, 2013). Hal ini sejalan dengan temuan Stephen O dan I. Oluranti (2011) bahwa pada kondisi jangka panjang, pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada modal pembangunan manusia dan diperlukan adanya penyaluran belanja modal Negara pada sektor pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan modal pembangunan manusia dan berakhir pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara (hakim, 2015).

Menurut Tjiptoherijanto melihat mutu manusia dari sisi kesehatan di mana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam undang-undang disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia sehingga pemerintah memiliki tanggungjawab memenuhi kesehatan setiap rakyatnya. Setiap penduduk berhak memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya ini merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional, maka wajar jika kesehatan dapat disebut menjadi investasi pemerintah pada belanja/pengeluaran pembangunan untuk pengembangan sumber daya manusia (Astri, Nikensari, dan Kuncara, 2013).

Menurut model pertumbuhan *Endogen* yang ditawarkan oleh Lucas (1988), investasi Pendidikan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Musgrave dan Rostow mengembangkan model di bawah penyebab pertumbuhan pengeluaran

publik. Mereka mengklaim bahwa pengeluaran publik merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi. Sektor publik awalnya memberi infrastruktur ekonomi seperti jalan, kereta api, pasokan air, dll. Dengan pertumbuhan ekonomi, keseimbangan investasi publik bergerak menuju pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan pengeluaran untuk layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan (Muritala & Taiwo, 2011).

*Craigwell et al. (2012)* dan *Kim & Lane (2013)* yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan telah terbukti menurunkan angka kematian bayi yang pada akhirnya meningkatkan tingkat harapan hidup. Menurut beberapa ekonom, pengeluaran kesehatan akan menurunkan PDB karena mengalihkan sumber daya dari investasi produktif. Konsep baru modal manusia oleh Becker (1964) telah membuka rute lain untuk menunjukkan pengaruh pengeluaran kesehatan terhadap PDB. Dalam arah baru ini, pengeluaran kesehatan dengan memperbaiki indikator kesehatan akan meningkatkan inventaris sumber daya manusia dan pertumbuhan PDB di negara-negara (Razmi, 2012).

Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan juga dapat dilihat dari sebagai komponen pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003). Schultz berpendapat bahwa apakah kesehatan yang buruk memiliki dampak pada total faktor produktivitas, yang juga terkait dengan tingkat output suatu negara. Jika kesehatan seseorang tidak cukup baik untuk bekerja, maka, orang ini keluar dari angkatan kerja. Ini akan memiliki refleksi akhir

pada pertumbuhan ekonomi. Jika orang mulai tidak bekerja karena kondisi kesehatan mereka, akan ada penurunan dramatis dalam tingkat output, yang juga menunjukkan hubungan yang kuat antara kesehatan dan pertumbuhan. Dapat dianggap bahwa kesehatan adalah indikator penting untuk produktivitas (Ercelik, 2018).

Penelitian Strauss dan *Thomas* (1998) menunjukkan bahwa beberapa bukti yang terkait dengan produktivitas dan kesehatan karena menurut Strauss dan Thomas (1998), ada hubungan yang kuat antara kesehatan dan pembangunan ekonomi. Dalam penelitian ini, dinyatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara pasar tenaga kerja dan masalah kesehatan. Poin penting adalah bahwa pertumbuhan ekonomi diperoleh dari efisiensi individu yang sehat (Ercelik, 2018).

Pengeluaran kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Iran selama periode 2001 - 2014. (Pakdaman, 2019). Penelitian lain yang menunjukkan keterkaitan antara variabel pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dilakukan oleh Amalia, Bestari (2019) dengan hasil temuan yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

### **2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pengertian infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur fisik dan jasa layanan yang diperoleh darinya untuk memperbaiki produktivitas ekonomi dan kualitas hidup seperti transportasi, telekomunikasi, kelistrikan, dan irigasi. Sedangkan infrastruktur permukiman adalah infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur fisik dan layanan yang diperoleh darinya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas hidup seperti air

bersih dan perumahan. Peran infrastruktur dalam pembangunan dapat dilihat dari sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, Sedang dalam tingkat ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Kontribusi infrastruktur terhadap peningkatan kualitas hidup dapat ditunjukkan oleh terciptanya *amenities* dalam lingkungan fisik, terjadinya peningkatan kesejahteraan, (peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata), terwujudnya stabilisasi makro ekonomi (keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja). (BAPPENAS,2002).

Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja baru. Meningkatnya pengeluaran sektor publik telah meluas yang telah menimbulkan minat baik di negara maju maupun berkembang mengoptimalkan ukuran pengeluaran pemerintahan. (Aphu, 2019).

Penyediaan fasilitas infrastruktur memiliki tujuan ganda untuk menghasilkan peluang kerja secara langsung sementara pada saat yang sama menggunakan fasilitasnya mendorong sektor-sektor produktif guna menghasilkan dan menyediakan lapangan kerja bagi populasi atau angkatan kerja yang pada akhirnya akan berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Araga, 2016).

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP Tahun 2020 utamanya akan fokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah

yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional, diantaranya: Pembangunan Manusia dengan sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia dan Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah dengan sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah, meningkatkan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi dan terpenuhinya perumahan dan pemukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga. Adapun besaran anggaran untuk tahun 2020 yakni Rp. 280 Triliun. (UU No. 20 tahun 2019).

Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) melalui PDRB. (Nur Vadila Putri, 2018). Penelitian lain yang menunjukkan keterkaitan variabel pengeluaran pemerintah fungsi infrastruktur berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, bila pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur meningkat maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (Nurlaila Hanum, 2020). Sejalan dengan itu, peningkatan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur memberikan kontribusi terhadap naiknya indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. (Windhu Putra, 2017).

#### **2.2.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Hal ini dapat diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Dengan kata lain PDB merupakan tolok ukur perkembangan ekonomi secara nasional yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh PDB sangat dipengaruhi

oleh faktor-faktor yang turut memberi andil dalam pertumbuhan produksi dari masing-masing sektor. Perkembangan PDB baik berdasarkan atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun dapat mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ini tentunya akan dapat menggambarkan kemajuan pembangunan ekonomi selama kurun waktu tertentu. (Merri Anitasari, 2013).

Pendidikan formal diyakini akan mampu mengembangkan sumber daya manusia agar menjadi modal dasar dalam pembangunan yang berguna bagi pertumbuhan ekonomi. Mengatasi hal ini tentulah di perlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam terciptanya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Pengeluaran pemerintah dapat juga dikatakan sebagai investasi pada fasilitas bidang pendidikan tentu akan membuat suatu wilayah menjadi lebih produktif, karena akumulasi pengetahuan dan peningkatan keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi dibidang pendidikan mempunyai makna yang sangat positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Todaro, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh (Safira, 2019) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan naik maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami kenaikan. Selanjutnya, penelitian oleh (Nur Vadila Putri, 2018) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui PDRB di kota Makassar. Pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa. (Ikbal, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Obadic (2011) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan investasi modal manusia untuk mengembangkan sektor ekonomi dengan meningkatkan keterlibatan tenaga kerja terampil dan semi terampil. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di tingkat tersier akan memberikan kontribusi input dan output pendidikan seperti meningkatnya angka partisipasi, meningkat tingkat peserta tenaga kerja. Pendidikan sebagai infrastruktur dasar untuk peningkatan modal manusia akan membuat orang lebih berpendidikan, sehingga mereka akan lebih kreatif dan produktif. Kesempatan berpendidikan akan membuka kesempatan yang lebih baik bagi orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik berharap dengan kesempatan itu orang akan melangkah kehidupan kesejahteraan yang lebih tinggi. Implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

#### **2.2.5 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang tujuannya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat yang baik terwujud. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan yang baik, yakni seberapa besar tingkat pembiayaan untuk sektor kesehatan,

besarnya belanja kesehatan berhubungan positif terhadap pencapaian derajat kesehatan masyarakat. (Sujudi, 2003).

Pengeluaran pemerintah pada bidang anggaran kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. (Todaro & Smith, 2003).

Bidang kesehatan membutuhkan dana investasi dalam jumlah yang cukup besar disebabkan output investasi pada bidang ini ada dua kategori pertama, adalah output yang bisa dilihat secara langsung berupa ketersediaan rumah sakit, puskesmas, dan polindes serta penyediaan berbagai fasilitas pendukungnya, dan kedua, adalah output yang tidak bisa dilihat kondisi fisiknya berupa tingkat kesehatan masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya diharapkan bisa memberi manfaat positif bagi meningkatnya pertumbuhan ekonomi. (Sharpe, Bradley, & Messinger, 2007).

Majunya infrastruktur kesehatan suatu daerah akan membuat penduduk di daerah tersebut dapat dengan mudah menjangkau pelayanan kesehatan yang baik ketika dibutuhkan. Mudahnya masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan akan membuat kesehatan masyarakat selalu dalam kondisi yang prima, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu akibat banyaknya masyarakat yang terserang penyakit karena tidak mendapat penanganan medis. Selanjutnya dengan tersedianya infrastruktur kesehatan yang mencukupi, ketahanan kesehatan masyarakat akan terjaga, sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital memiliki peran ganda yaitu kesehatan sebagai input dan output dalam pembangunan ekonomi menyebabkan variabel ini sangat penting

pengaruhnya. Dan implikasinya produktivitas masyarakat akan bertambah sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Safira, 2019).

Craigwell et al. (2012) dan Kim & Lane (2013) yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan telah terbukti menurunkan angka kematian bayi yang pada akhirnya meningkatkan tingkat harapan hidup. Menurut beberapa ekonom, pengeluaran kesehatan akan menurunkan PDB karena mengalihkan sumber daya dari investasi produktif. Konsep baru modal manusia oleh Becker (1964) telah membuka rute lain untuk menunjukkan pengaruh pengeluaran kesehatan terhadap PDB. Dalam arah baru ini, pengeluaran kesehatan dengan memperbaiki indikator kesehatan akan meningkatkan investasi sumber daya manusia dan pertumbuhan PDB di negara-negara berkembang (Razmi, 2012). Agung Budi Luhur W (2016) menyatakan bahwa, variabel infrastruktur kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

#### **2.2.6 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Fungsi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Peran infrastruktur dalam pembangunan dapat dilihat dari sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, Sedang dalam tingkat ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Kontribusi infrastruktur terhadap peningkatan kualitas hidup dapat ditunjukkan oleh terciptanya *amenities* dalam lingkungan fisik, terjadinya peningkatan kesejahteraan, (peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata), terwujudnya stabilisasi makro ekonomi (keberlanjutan fiskal,

berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja). (BAPPENAS, 2002).

Pada dasarnya dana pembangunan yang dianggarkan dan direalisasikan diarahkan untuk meningkatkan produktifitas perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yang berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, tidak hanya berfokus pada tahun tertentu, terutama untuk pemeliharaan aset tetap yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran, sehingga pembangunan sarana dan prasarana berupa infrastruktur sepenuhnya dapat meningkatkan pelayanan publik serta dapat meningkatkan arus barang dan jasa yang akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan laju pembangunan. (Juardi, 2013).

Penyediaan fasilitas infrastruktur juga memiliki tujuan ganda yakni menghasilkan peluang kerja secara langsung sementara pada saat yang sama menggunakan fasilitasnya mendorong sektor-sektor produktif guna menghasilkan dan menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. (Araga, 2016).

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP Tahun 2020 utamanya akan fokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. (UU No. 20 tahun 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Hasti Aringga Suminar (2016), pembangunan infrastruktur memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Hal ini membuktikan bahwa infrastruktur yang ditingkatkan dalam setiap periodenya akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan akses serta

mendorong perekonomian. Pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur membutuhkan biaya yang besar untuk melaksanakan berbagai programnya seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih sehingga belum mampu memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk bidang publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat yang memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. (Safira, 2016).

### **2.2.7 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Adapun hubungan antara indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dalam penelitian yang dilakukan oleh (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014) menyatakan bahwa ketika pendapatan atau PDB per kapita rendah akibat pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun (Tjodi, 2018).

Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan PDRB per kapita, PDRB per kapita yang tinggi akan mengubah pola konsumsi dalam memenuhi kebutuhan (Todaro 1998). Ini berarti bahwa semakin tinggi indeks pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan dan daya beli

maka semakin tinggi pula output barang dan jasa pada suatu negara atau daerah. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Ranis, Stewart, dan Ramirez 2000) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan kecuali jika didahului atau disertai dengan peningkatan pembangunan manusia, (Andriyani, 2019).

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh capital, labour and human capital worker. Teori ini menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang menekankan pentingnya tabungan dan investasi *human capital* untuk mempercepat pertumbuhan, hal ini menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. (Todaro 1998) dalam (sigit wibowo, 2016).

### 2.3 Tinjauan Empiris

**Tabel 2.1 Peta Studi Terkait Sebelumnya**

No	Penulis	Variabel	Metode	Lokasi penelitian	Hasil penelitian
					pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan

1	Nur Vadila Putri, dkk (2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sektor pendidikan</li> <li>▪ Sektor kesehatan</li>   <li>▪ Infrastruktur</li> <li>▪ PDRB Perkapita</li> <li>▪ IPM</li> </ul>	<i>Regression Analysis</i>	Makassar	kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Makassar baik itu secara langsung ataupun melalui PDRB. Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara langsung tetapi tidak signifikan jika melalui PDRB.
2	Jurais, (2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengeluaran Pemerintah</li> <li>▪ Investasi</li> <li>▪ Kesempatan Kerja</li> <li>▪ Pertumbuhan Ekonomi</li> </ul>	<i>analisi Structural Model</i>	Sulawesi Selatan	Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengeluaran Infrastruktur secara langsung tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja melalui investasi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pendidikan secara langsung tidak berpengaruh terhadap

					<p>kesempatan kerja dan secara tidak langsung melalui investasi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur kesehatan secara langsung berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja dan secara tidak langsung melalui investasi pertumbuhan ekonomi. Investasi secara langsung tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja namun secara tidak langsung berpengaruh positif melalui pertumbuhan ekonomi. Investasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara langsung terhadap kesempatan kerja.</p>
--	--	--	--	--	--

3	<p>Siske Yanti Maratade,</p> <p>Debby Ch. Rotinsulu, Audie O. Niode (2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Pertumbuhan Ekonomi</i></li> <li>• <i>Indeks Pembangunan Manusia</i></li> </ul>	<i>Regresi Analisis</i>	Sulawesi Utara	<p>Ada hubungan kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia dan sebaliknya Indeks Pembangunan manusia mempunyai hubungan kausalitas dengan pertumbuhan ekonomi. kedua variabel tersebut mempunyai kesimpulan a ketika pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan (peningkatan ataupun penurunan) maka hal tersebut akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan sebaliknya ketika indeks pembangunan manusia mengalami perubahan (peningkatan atau pun penurunan) maka hal tersebut akan mempengaruhi</p>
---	--	---	-------------------------	----------------	---

					pertumbuhan ekonomi.
4	Craigwell et al (2012)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengeluaran Pemerintah</li>   <li>▪ Pendidikan</li> <li>▪ Perawatan Kesehatan</li> </ul>	<i>Regresi data panel</i>	Caribia	Hasil menunjukkan pengeluaran kesehatan memiliki efek positif signifikan terhadap status kesehatan dan pengeluaran pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi sekolah.
5	Cici Darmayanti, dkk (2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dana otonomi khusus</li> <li>▪ Dana alokasi khusus</li> <li>▪ Alokasi belanja infrastruktur</li> <li>▪ Jumlah penduduk</li> <li>▪ Peringkat kesehatan</li> <li>▪ Kinerja keuangan</li> </ul>	<i>Analisis Regresi Linear Berganda</i>	Provinsi Aceh	Dana khusus, dana alokasi khusus, alokasi belanja infrastruktur, jumlah penduduk, peringkat kesehatan dalam IPKM, dan kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel alokasi belanja kesehatan pada kabupaten/kota Di Provinsi Aceh, baik secara simultan maupun parsial selama tahun anggaran 2011-2012.
					Hasil penelitian menunjukkan belanja

6	Sigit wibowo (2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belanja pemerintah pendidikan</li> <li>▪ Belanja pemerintah kesehatan</li> <li>▪ Pertumbuhan ekonomi</li> <li>▪ Indeks pembangunan manusia</li> </ul>	2SLS	Jawa Tengah	pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.
7	Nalyda Yola (2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengeluaran pemerintah</li> <li>▪ Pendidikan</li> <li>▪ Kesehatan</li> <li>▪ Infrastruktur</li> <li>▪ PDRB</li> <li>▪ Kesempatan kerja</li> </ul>	<i>Two Stage Least Square (2SLS)</i>	Jawa Barat	Hasil menunjukkan pengaruh pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan, tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Selain itu pemerintah perlu melakukan pengontrolan terhadap pemanfaatan pengeluaran pemerintah daerah tersebut agar dapat diperoleh hasil yang optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
					Hasil penelitian menunjukan bahwa pengeluaran belanja pemerintah pusat dalam

8	Jehuda Jean Sanny Mongan, dkk (2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ belanja pemerintah pusat</li> <li>▪ belanja pemerintah daerah</li> <li>▪ belanja pendidikan</li> </ul>	<i>Regresi Data Fanel</i>	Indonesia	pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah pusat dalam sector kesehatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam pendidikan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
9	Eggoh (2015)	Education, Health And Economic Growth	Model regresi dinamik panel	Africa	Pengeluaran pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
10	Susye Marlen Ketye Lengkong, dkk (2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anggaran pendidikan</li> <li>▪ Anggaran kesehatan</li> <li>▪ IPM</li> <li>▪ Pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	<i>Analisis Jalur</i>	Bitung	Hasil penelitian anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, IPM, pertumbuhan ekonomi, di kota Bitung baik secara langsung maupun tidak langsung didapatkan hasil yang saling berkaitan dan positif antara masing-masing variabel yang diteliti.
					Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IMP) memiliki pengaruh

11	Ahmad Syafullah & Nasaruddin Malik. 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produk Domestik Bruto(PDB)</li> <li>▪ Indeks Pembangunan</li> <li>▪ Manusia (IMP)</li> <li>▪ Kemiskinan</li> </ul>	<i>Analisis regresi berganda</i>	Asean	negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 4 Asean, kemudian produk domestik bruto (PDB) memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Asian-4.
12	Maitrah B & Mukhopadhyay. 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan</li> <li>▪ Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan</li> <li>▪ Pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	<i>Johansen cointegration tests</i>	Asia Pasifik	hasil penelitian menemukan adanya peran signifikan pengeluaran public terhadap pertumbuhan ekonomi.
13	Abu Nurudeen & Abdullahi Usman	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan</li> <li>▪ Pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	<i>Regresi</i>	Nigeria	Hasil penelitian menemukan belanja kesehatan memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja kesehatan memiliki efek negative.
14	Bakti, T (2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengeluaran Pendidikan</li> <li>• Tenaga kerja</li> </ul>	Model regresi linear berganda	Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pertumbuhan ekonomi</li> </ul>			pertumbuhan ekonomi.
15	Iqbal, M (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Pengeluaran pemerintah</li> <li>• Indeks pembangunan manusia</li> </ul>	Model regresi linier berganda	Kota Metro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM</li> <li>• Pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM</li> <li>• Pengeluaran kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM</li> </ul>

## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

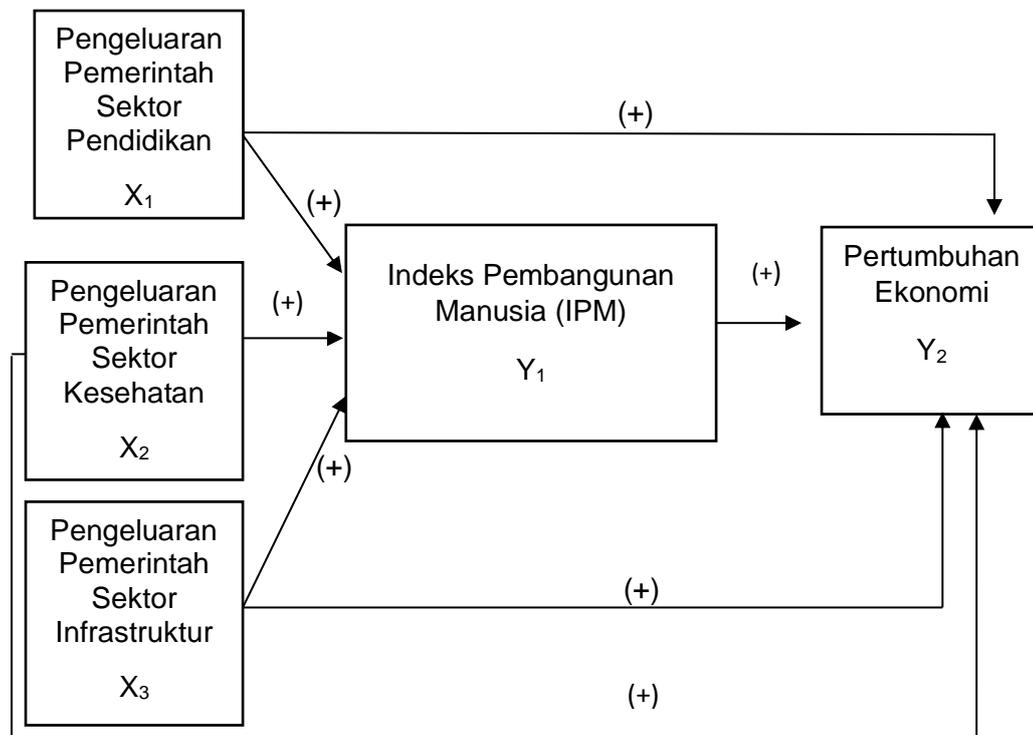
#### **3.1 Kerangka Konseptual**

Sumber daya manusia merupakan modal dasar kekayaan suatu bangsa, karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, politik dan melaksanakan pembangunan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kesehatan merupakan suatu hal yang penting dan untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena sumber daya yang berkualitas akan memberikan multiplier effect terhadap pembangunan dibidang ekonomi. Dengan kesehatan yang baik seseorang akan lebih kuat dan jernih pemikirannya dalam bekerja. Selain bidang kesehatan, bidanga pendidikan dalam hal ini pendidikan formal diyakini akan mampu mengembangkan sumber daya manusia agar menjadi modal dasar dalam pembangunan yang berguna bagi pertumbuhan ekonomi. Mengatasi hal ini tentulah di perlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam terciptanya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Pengeluaran pemerintah dapat juga dikatakan sebagai investasi pada fasilitas bidang pendidikan tentu akan membuat suatu wilayah menjadi lebih produktif, karena akumulasi pengetahuan dan peningkatan keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi dibidang pendidikan mempunyai makna yang sangat positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Selain pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur juga turut memberikan pengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara atau daerah, karena untuk menciptakan sumber daya

manusia yang berkualitas dibutuhkan infrastruktur yang memadai dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah untuk menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Teori Rostow dan Musgrave (Mubarog, 2013) memperkenalkan model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Teori ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar dan pelayanan dasar lainnya dengan tujuan peningkatan kualitas manusia dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



### **Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian**

#### **3.2 Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam sebuah penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia di Indonesia.
2. Diduga pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia di Indonesia.
3. Diduga pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia di Indonesia.
4. Diduga pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan manusia di Indonesia.
5. Diduga pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan manusia di Indonesia.
6. Diduga pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan manusia di Indonesia.
7. Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.